



PEMBANGUNAN BERBASIS WILAYAH

Akhir Tahun, Pengurus Kampung Harus Terbentuk

YOGYA (KR) - Ditargetkan pada akhir tahun ini, seluruh kampung di Kota Yogya berhasil membentuk pengurus. Ketentuan tentang pembentukan pengurus kampung ditetapkan melalui Perwal 72 2018. Di dalam peraturan tersebut, kampung yang dimaksud adalah bekas rukun kampung yang pernah ada di Kota Yogya yaitu sebanyak 170 kampung.

"Saat ini kami terus melakukan sosialisasi ke wilayah mengenai pembentukan pengurus kampung. Tanggapan masyarakat pun cukup baik dan mereka berkomitmen untuk menyusun kepengurusan kampung," jelas Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogya Zenni Lingga, Senin (3/12).

Imbauan pembentukan pengurus kampung lantaran pergeseran basis pembangunan di Kota Yogya menjadi berbasis kampung. Sehingga dibutuhkan sejumlah dukungan, di antaranya pengurus kampung. Meski demikian, menurut Zenni pengurus kampung tidak akan mengambil alih peran pengurus RT/RW yang sudah ada. Hal ini karena tugas yang di-

ampu berbeda. Pengurus kampung akan lebih banyak bermitra dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terkait program pembangunan. Sedangkan RT/RW lebih berperan untuk pelayanan masyarakat.

"Pembentukan pengurus kampung ini bukan berarti menghidupkan kembali Rukun Kampung (RK) yang dulu sempat ada. Tetapi sebatas pengurus kampung saja. Rukun Kampung sudah tidak ada lagi sejak puluhan tahun lalu," imbuh Zenni.

Susunan kepengurusannya pun sederhana yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan tiga seksi seperti seksi pembangunan fisik, seksi pembangunan nonfisik serta seksi data dan teknologi informasi.

Zenni berharap, seluruh kampung ditargetkan sudah mampu menyusun kepengurusan paling lambat pada pekan ketiga Desember. Susunan kepengurusan tersebut akan ditetapkan melalui surat keputusan lurah setempat.

Selain itu, posisi ketua kampung tidak boleh diisi oleh warga yang rang-

kap jabatan seperti pengurus RT, RW maupun LPMK. Pembentukan pengurus kampung juga tidak bisa dipisahkan dari program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah melalui pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan program Gandeng Gendong.

Zenni menjelaskan, Gandeng Gendong memiliki lima aspek dukungan yaitu dari unsur pemkot, kampus, korporat, komunitas dan kampung. "Jika satu aspek tidak ada, maka program tidak bisa berjalan optimal. Karena salah satunya adalah kampung, maka pembentukan pengurus kampung merupakan salah satu upaya penguatan program Gandeng Gendong," ujarnya.

Oleh karena itu, setelah pengurus kampung terbentuk, mulai awal tahun 2019 diharapkan mereka bisa aktif dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang sejak di tingkat kelurahan. Sehingga, berbagai kegiatan pembangunan yang berbasis kampung atau wilayah bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005